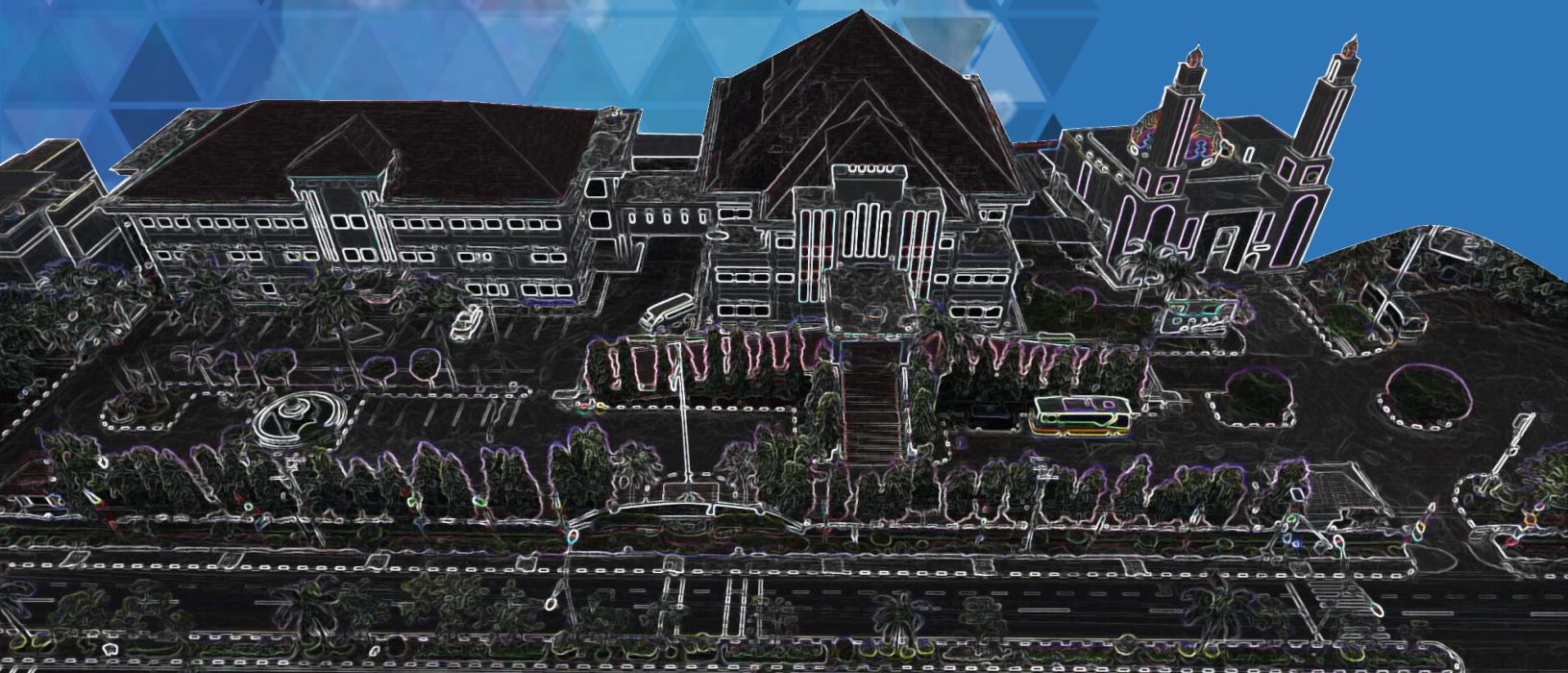




**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI
TAHUN 2025**

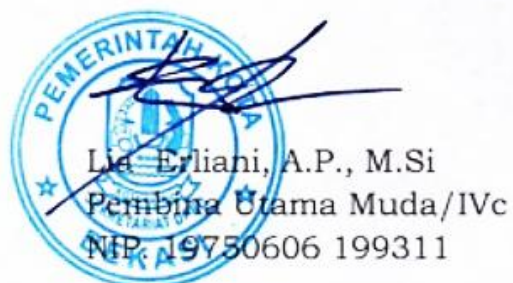


KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun 2025 dapat disusun. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang membuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda. AP4EP Tentang Pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, serta arahan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dalam suatu pola sikap dan tindak.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Bekasi, 4 September 2025
Sekretaris DPRD Kota Bekasi



Lia Erliani, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19750606 199311

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR CHART.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi	12
2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	31
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI.....	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	36
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.....	36
3.2.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.....	39
3.2 Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Anggaran Pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.....	44
BAB IV PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025	12
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi s/d Triwulan II Tahun 2025	22
Tabel 2.3	Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 Terhadap Indikator Kinerja Utama	30
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi	38
Tabel 3.2	Tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	40
Tabel 3.3	Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi	41
Tabel 3.4	Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja 2025 Sekretariat DPRD Kota Bekasi	42
Tabel 3.5	Rencana Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025	46

DAFTAR CHART

Chart 2.1	Realisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi s/d Triwulan II Tahun 2025.....	28
Chart 2.2	Pagu Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025	29
Chart 2.3	Realisasi Kinerja Serketariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan. Dalam menyusun dokumen RKPD, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan dan penyusunannya memperhatikan Seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan. Oleh karena hal tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.

Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yang merupakan dokumen perencanaan periode 3 (tiga) tahunan yang memuat visi, misi, dan program perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 memuat Program/Kegiatan Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun berjalan, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menjalankan Program dan Keempatannya guna mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya didalam Renstra dan bahan evaluasi

pencapaian Tujuan dan Sasaran dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Pada tahun berjalan 2025, seiring dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara serentak, maka terdapat perubahan terhadap dokumen perencanaan. Berdasarkan Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda. AP4EP tanggal 24 Pebruari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Pebruari 2025 tentang Penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagai pilar penutup sekaligus fondasi penggerak dari Sapta Program Kota Bekasi Keren, Gerakan KOBE BERKINERJA dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Program ini menjadi tulang punggung dalam mewujudkan birokrasi yang responsif, efisien, dan berorientasi pada hasil - sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan prinsip good governance yang menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, termasuk Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.

Bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Kobe Berkinerja menjadi kerangka acuan penting dalam membangun sistem manajemen pendukung yang andal dan transparan. Program ini mendorong Sekretariat DPRD untuk tidak hanya menjadi unit pelayanan administratif, tetapi juga mitra strategis DPRD dalam mewujudkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berbasis data, akuntabel, dan tepat waktu.

Kinerja Sekretariat DPRD akan diukur melalui indikator baru, yaitu: 1) Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat, yang mencerminkan efektivitas dukungan administratif, teknis, dan substansial; 2) Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, yang mengukur sejauh mana Sekretariat mampu mendukung proses penyusunan Perda, pengawasan pelaksanaan program, dan respon terhadap aspirasi masyarakat — termasuk dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan dan digitalisasi layanan.

Lebih jauh, Kobe Berkinerja juga menjadi dasar dalam penyusunan sistem anggaran, akuntabilitas kinerja, dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan daerah — sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri dan Inmendagri terkait kodifikasi dan nomenklatur perencanaan. Hal ini memastikan bahwa kinerja Sekretariat DPRD tidak hanya diukur secara internal, tetapi juga selaras dengan target kinerja makro pembangunan Kota Bekasi dan RPJMN 2025–2029. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Kobe Berkinerja ke dalam Renstra Sekretariat DPRD bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga transformatif — mendorong budaya kerja berbasis kinerja, inovasi pelayanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan, demi terwujudnya pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan dipercaya masyarakat.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan/ dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dibuat berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025-2029 dituangkan kedalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Selanjutnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 akan dijadikan pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan

Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarustamakan Gender (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 21 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 100 Seri D);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender Tahun 2024-2028;
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Bekasi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 27).

27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda.AP4EP Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dan sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang memuat:

1. Mengevaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dan menjadi acuan bagi Seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit di lingkungan Sekretariat DPRD kota Bekasi;
2. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
4. Memberikan gambaran kemampuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025; dan

7. Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pejabat/Pimpinan instansi.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan perubahan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2025.
2. Menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Bekasi tahun 2025.
3. Mengoperasionalkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Sekretariat DPRD sudah disahkan dan pencapaian Renja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pada bagian ini berisikan kajian terhadap kinerja berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD dalam rangka penyampaian kinerja pembangunan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Pada bagian ini berisikan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, berikut Tabel perubahan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025. Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana tabel Perubahan Rencana Kerja

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebelumnya, maka dilakukan pengukuran dan Evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan cara menghitung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DPRD Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	100%	94.82%	100%	40,9%	40,9%
4.02.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	94.82%	100%	45,8%	45,8%
4.02.01.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	12	12	3	25
4.02.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	3 Laporan	3	3	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)
4.02.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	96.62%	100%	54,7%	54,7%
4.02.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	718	2086	642	30,78
4.02.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2	2	2	100
4.02.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanam/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	15 Laporan	-	15	5	33,33
		Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD					
4.02.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4.02.01.2 .05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	-
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	15,5%	15,5%
4.02.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	15,5%	15,5%
4.02.01.2 .05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	14 Orang	14	52	2	3,85
4.02.01.2 .05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53 Orang	48	48	13	27,08
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	56,9%	56,9%
4.02.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	56,9%	56,9%
4.02.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100
4.02.01.2 .06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4	4	3	75
4.02.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3	3	2	66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)
4.02.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65.600 Dokumen	4	4	0	0
4.02.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.990 Laporan	12	12	6	50
4.02.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.025 Laporan	12	12	6	50
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	100%	90.91%	100%	13,6%	13,6%
4.02.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90.91%	100%	13,6%	13,6%
4.02.01.2 .07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	220 Unit	200	220	30	13,64
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	100%	99.41%	100%	30,9%	30,9%
4.02.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99.41%	100%	30,9%	30,9%
4.02.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	539 Laporan	556	566	6	1,06
4.02.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36	36	18	50
4.02.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	12	5	41,67
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	100%	80%	100%	44,7%	44,7%
4.02.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	80%	100%	44,7%	44,7%
4.02.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1	1	0	0
4.02.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	33	33	15	45,45

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)
4.02.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Unit	0	100	100	100
4.02.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	177	177	50	28,25
4.02.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4	4	2	50
		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	100%	89.33%	100%	18%	18%
4.02.01.2 .15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	89.33%	100%	18%	18%
4.02.01.2 .15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	637	650	350	53,85
4.02.01.2 .15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	7	6	0	0
4.02.01.2 .15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	35	50	0	0
4.02.01.2 .16	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	100%	100%			
4.02.01.2 .16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	42 Laporan	12	12	-	-
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
		Persentase Terselenggaranya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda	100%	85.71%	100%	30,6%	30,6%
4.02.02.2 .01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	85.71%	100%	16%	16%
4.02.02.2 .01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	2	2	1	50
4.02.02.2 .01.02	Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	10	10	1	10
4.02.02.2 .01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	12	10	2	20
4.02.02.2 .01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	10 Dokumen	2	7	0	0
4.02.02.2 .01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1 Dokumen	1	1	0	0
		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan	100%	100%	100%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)
		Penetapan APBD dan LAPBD					
4.02.02.2 .02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%	100%	0%	0%
4.02.02.2 .02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1	1	0	0
4.02.02.2 .02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1	1	0	0
4.02.02.2 .02.03	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1	1	0	0
4.02.02.2 .02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1	1	0	0
4.02.02.2 .02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1	1	0	0
4.02.02.2 .02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1	1	0	0
		Persentase Terasilinasinya Kegiatan DPRD	100%	100%	100%	42,9%	42,9%
4.02.02.2 .03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Dokumen dan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	42,9%	42,9%
4.02.02.2 .03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	14 Laporan	12	12	6	50
4.02.02.2 .03.02	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	14 Laporan	12	12	6	50
4.02.02.2 .03.03	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	14 Laporan	12	12	6	50
4.02.02.2 .03.04	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	14 Laporan	12	12	6	50
4.02.02.2 .03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1	1	0	0
4.02.02.2 .03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1	1	0	0
4.02.02.2 .03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	33,7%	33,7%
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	1	-	-	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	14 Dokumen	6	6	1	16,67
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	204 Orang	204	210	23	10,95
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	54 Orang	54	54	31	57,41
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	52 Dokumen	12	12	6	50
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dokumen	3	3	1	33,33
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%	66,7%	66,7%
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	3	3	2	66,67
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	3 Dokumen	3	3	2	66,67
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2	3	2	66,67
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%	100%	50%	50%
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	12	12	6	50
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Fasilitasi Tugas DPRD	100%	100%	100%	37,5%	37,5%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen	5	12	0	0
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	3 Laporan	1	1	1	100
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan	3 Dokumen	12	12	6	50
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	36 Dokumen	3	3	0	0

Catatan : Data disesuaikan dengan target Renstra 2024-2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian kinerja Tahun 2024 dan capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Melalui tabel tersebut maka dapat dijelaskan capaian kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah 100% (Berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 adalah:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian adalah 96.62%. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD bersifat situasional dan menyesuaikan kebutuhan, yaitu yang dalam pencapaian target berfokus pada jumlah orang yang menerima gaji atau tunjangan;
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian adalah 90.91%;
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian adalah 99.41%. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat bersifat situasional dengan jumlah surat menyurat terkirim.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, capaian kinerja 80%. Tidak tercapainya kinerja karena pada Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya hanya teralisasi 200 unit dari 220 unit. Hal ini dikarenakan terkendala terkait pengadaan dan distribusi barang;
 - e. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, capaian adalah 89.33%. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel tidak dilaksanakan karena masih dilaksankannya proses renovasi gedung Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD tidak mencapai target kinerja dikarenakan sebagian dewan telah melakukan medical check up secara mandiri sebagai syarat calon legislatif.
 - f. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, capaian adalah 85.71%. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah

Akademik hanya terealisasi 28,57% yaitu dengan tersampainya usulan raperda inisiatif DPRD Kota Bekasi Tahun 2024.

2. Program/kegiatan/sub. Kegiatan yang capaian kinerjanya mencapai 100% adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.
3. Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi 100% adalah tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan adalah:
 - a. Belum optimalnya pengendalian, dan kurangnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) perangkat daerah sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU secara berjenjang.
 - b. Belum memudahinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan, yang belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monev.

Indikasi:

 - Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal perencanaan, contohnya: target kegiatan dapat dievaluasi dan disesuaikan pada saat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dalam rangka pencapaian target kinerja dan pencapaian target IKU.
 - Pelaporan pada Aplikasi Simpelbang dan Aplikasi Monev yang belum tepat syarat dan tepat waktu.

- c. Rendahnya kualitas data dan informasi, diakibatkan pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/ beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah tidak dapat tercapainya target keempat indikator program tersebut di atas, yang dikhawatirkan berpengaruh juga terhadap pencapaian indikator sasaran atau Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah terdapat beberapa Kegiatan/ Sub. Kegiatan yang sudah dilaksanakan, terlihat dari realisasi yang dihasilkan dan sudah sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta ada beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan lainnya belum terdapat keluarannya dikarenakan belum adanya jadwal pembahasan/ pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :

1. Sub. Kegiatan yang capaian kinerjanya sudah mencapai 100%, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan, Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan dan Kantor, Sub Kegiatan Pemeliharaan Mabel, dan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD telah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Sub. Kegiatan yang capaian kinerjanya sudah mencapai 50% atau berjalan sesuai jadwal kegiatan yang sifatnya rutin dan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan setiap bulan, yaitu: Sub Kegiatan Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapar Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian, Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Sub Kegiatan Hubungan Masyarakat, Kegiatan Penyerapan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Sub Kegiatan Kode Etik DPRD, dan Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.

Sub Kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai jadwal karena kegiatan dilakukan tiap bulan. Adapun untuk Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah telah dilakukan sesuai jadwal, namun untuk pelaporan realisasi kegiatannya dilakukan pada akhir tahun.

3. Sub. Kegiatan yang capaian kinerjanya masih 0% atau dibawah 50% dikarenakan jadwal kegiatan belum dilaksanakan.

Berdasarkan data Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 – Triwulan II, rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah **35.27%** dengan predikat kinerja kegiatan adalah **“Sangat Rendah”**. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini tentunya dikarenakan ada banyak kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada Triwulan II dan seterusnya.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum tercapainya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengendalian, dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) mulai dari level bagian sampai dengan level

- perangkat daerah, sebagai dasar untuk perbaikan kinerja dan dalam rangka pencapaian target kinerja yang berkontribusi dalam pencapaian target IKU.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai IKU .
 3. Meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan perencanaan dan pelaporan mulai dari level bagian sampai dengan level perangkat daerah, untuk mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga memahami tata cara proses pelaporan dan monev, sehingga kinerja dapat diukur.
 4. Meningkatkan kualitas data dan informasi, sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat, sebagai dasar pengolahan data, perumusan analisis, dan rekomendasi.

Tabel 2.2
 Realisasi Anggaran Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi
 s/d Triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN			
					TARGET	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SEKRETARIAT DPRD		%	100	232.840.644.843	66.310.340.089	28,5
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		%	100	111.480.241.704	40.935.564.283	36,7
			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD					
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	%	100	80.000.000	4.236.000	5,3
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	40.000.000	4.236.000	10,59
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	40.000.000	0	0

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN			
					TARGET	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	15.063.367.000,00	6.038.907.118,00	40,1
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2086	14.999.367.000	6.029.386.618	40,2
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	40.000.000	9.520.500	23,8
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	15	24.000.000	0	0
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	%	100			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	951.170.000	54.291.600	5,71
6		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	52	379.170.000	2.101.000	0,55
7		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	48	572.000.000	52.190.600	9,12
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	6.679.329.562	1.331.941.500	19,9
8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	0	0
9		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	2.937.763.000	626.566.500	21,33
10		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	459.116.562	54.100.000	11,78
11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	580.000.000	0	0
12		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	1.552.450.000	410.850.000	26,46
13		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1.000.000.000	240.425.000	24,04

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN			
					TARGET	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.200.000.000	0	0
14		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	220	1.200.000.000	0	0
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	6.365.183.760	2.746.108.392	43,1
15		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	566	25.000.000	974.00	3,9
16		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	1.200.000.000	551.618.396	45,97
17		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.140.183.760	2.193.515.996	42,67
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	%	100			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	8.562.000.000	2.325.073.149	27,2
18		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	120.000.000	0	0
19		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	510.000.000	35.179.359	6,9
20		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	100	100.000.000	99.960.000	99,96
21		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	177	832.000.000	0	0
22		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	7.000.000.000	2.189.933.790	31,28
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	%	100			

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN			
					TARGET	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	71.579.191.382	28.286.660.744	39,5
23		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	650	70.644.191.382	28.286.660.744	40,04
24		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	6	770.000.000	0	0
25		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	165.000.000	0	0
		Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	%	100	1.000.000.000	148.345.780	14,8
26		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	1.000.000.000	148.345.780	14,83
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	%	100	121.360.403.139	25.374.775.806	20,9
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%	100	21.102.373.000	1.511.262.649	7,16
27		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	2	1.450.000.000	196.264.038	13,54
28		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	10	9.104.205.000	487.691.680	5,36
29		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	10	4.135.068.000	812.306.931	19,64
30		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	7	5.822.010.000	0	0
31		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	591.090.000	15.000.000	2,54
			Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	%	100			
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	7.586.420.000	0	0
32		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	2.000.000.000	0	0
33		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1.500.000.000	0	0
34		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	735.000.000	0	0
35		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1	1.116.420.000	0	0

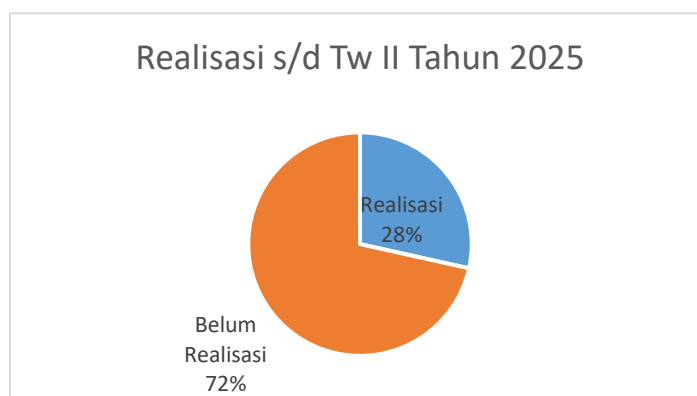
NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN			
					TARGET	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1	735.000.000	0	0
37		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1.500.000.000	0	0
			Persentase Terasilinasinya kegiatan DPRD	%	100			
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Dokumen dan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	33.727.514.928	7.852.652.464	23,3
38		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Laporan	12	5.111.670.264	1.383.309.010	27,06
39		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	12	5.111.670.264	1.343.571.474	26,28
40		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	12	5.111.670.264	1.282.488.893	25,09
41		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	12	5.111.670.264	1.169.110.518	22,87
42		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen	1	1.700.000.000	0	0
43		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	1	9.000.000.000	2.092.952.674	23,26
44		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1	2.580.833.872	581.219.895	22,52
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100	22.932.439.000	4.172.818.426	18,2
45		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	5.834.827.000	1.445.587.102	24,78
46		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	210	2.341.612.000	189.200.000	8,08
47		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	54	756.000.000	300.000.000	39,68
48		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	12.000.000.000	2.044.210.264	17,04
49		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	3	2.000.000.000	193.821.060	9,69

NO	SASARAN RKPD	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN			
					TARGET	PAGU	REALISASI s/d TRIWULAN II	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	100	12.926.007.500	7.498.597.700	58
50		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	3	284.182.500	132.520.000	46,63
51		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	3	925.000.000	83.535.200	9,03
52		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	11.716.825.000	7.282.542.500	62,15
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	3.089.068.000	396.202.877	12,8
53		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	12	3.089.068.000	396.202.877	12,83
		Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	19.996.580.711	3.943.241.690	19,7
54		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	12	5.495.820.000	0	0
55		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1	1.209.194.711	427.790.509	35,38
56		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	3	11.991.566.000	2.819.200.602	23,51
57		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	12	1.300.000.000	696.250.579	53,56

Sumber: <https://siencang.bekasikota.go.id/monev2025> (Data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 melaksanakan kegiatannya didukung anggaran, yaitu untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 111.480.241.704,- dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 126.399.040.428,-, sehingga total anggaran murni Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 237.879.282.132,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Adapun serapan sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 66.310.340.089,- (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

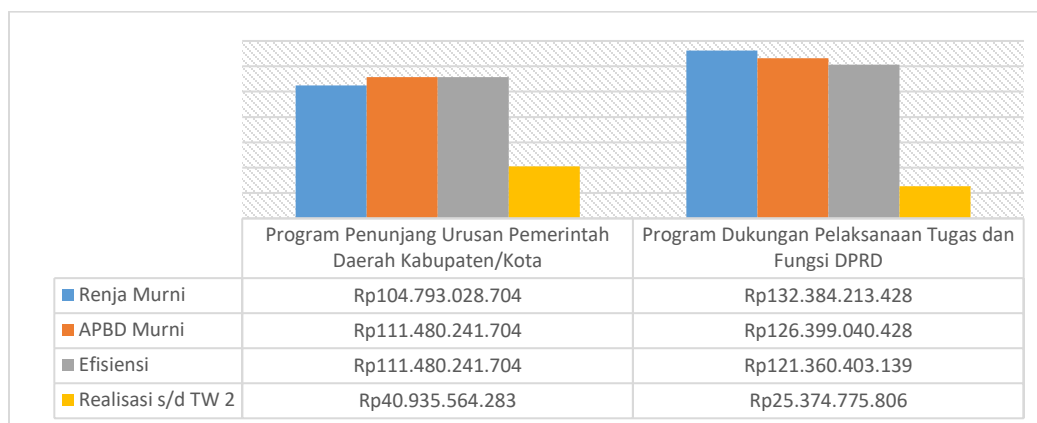
Chart 2.1
Realisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi
s/d Triwulan II Tahun 2025



Pada renja murni tahun 2025, pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebesar Rp. 237.177.242.132,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratur Tuga Puluh Dua Rupiah). Kemudian mengalami penambahan anggaran pada APBD Murni sebesar Rp. 702.040.000,- (Tujuh Ratus Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), menjadi Rp. 237.879.282.132,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

Pada Triwulan II Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Bekasi melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 5.038.637.289,- (Lima Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), sehingga total pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi menjadi Rp. 232.840.644.843,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) seperti tampak pada grafik di bawah.

Chart 2.2
Pagu Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025



Sumber: Renja 2025, SIPD Kota Bekasi 2025

2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Adapun dengan anggaran setelah efisiensi sebesar Rp. 232.840.644.843,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut adalah Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu, Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu, Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tampak pada tabel di bawah:

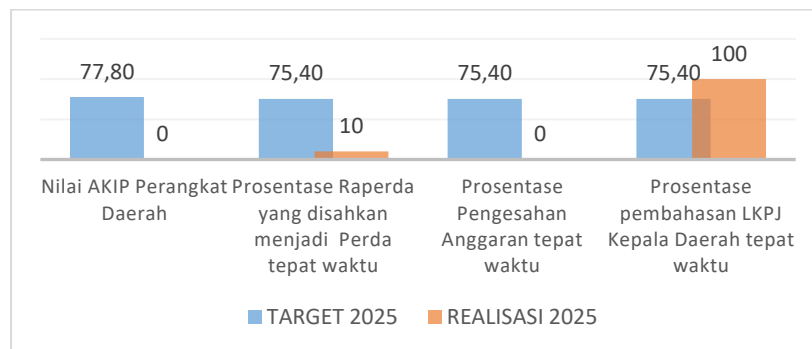
Tabel 2.3
Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi
Tahun 2025 Terhadap Indikator Kinerja Utama

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	TINGKAT
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	75.40%	10%	13.26%
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.40%	(belum dapat dihitung)	-
		Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	75.40%	100%	132.63%
2.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.80	Nilai Belum Keluar	-

Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari keempat indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah terdapat progres capaian kinerja khususnya pada indikator kinerja Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi perda tepat waktu dan Prosentase Pengesahan Anggaran.

Chart 2.3
Realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025



Sumber: Data diolah Bagian Program dan Perencanaan, Tahun 2025

1. Capaian indikator sasaran Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda sebesar 10% dengan tersusunnya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu sudah dilakukan beberapa pembahasan diantaranya: pembahasan raperda tentang RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, Pembahasan Raperda

tentang Perubahasan Perda Kota Bekasi tentang Pengelolaan Sampah dan Pembahasan Perubahan Raperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Capaian indikator Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu belum dapat dihitung dikarenakan jadwal kegiatan terdapat pada Triwulan III Tahun 2025, sehingga belum dilakukan pembahasan terkait anggaran.
3. Capaian indikator Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu sebesar 100%. Sesuai dengan rencana tersusun 1 laporan Dokumen Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah di Bulan April sampai dengan Juni 2025
4. Capaian indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah masih belum dapat dihitung karena belum dilakukan penilaian terhadap Sakip, sehingga belum terdapat nilai AKIP.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

1. Sekretariat DPRD Kota Bekasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 telah melakukan pelayanan terhadap DPRD Kota Bekasi melalui 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Pada subbab sebelumnya dijelaskan rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 35,27% dengan serapan anggaran Rp. 66.310.340.089,00,- (Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
2. Dalam pelayanannya Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki permasalahan dan hambatan. Identifikasi permasalahan dan hambatan Sekretariat DPRD didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencapaian IKU maupun IKK antara lain:
 - a. Kualitas Layanan yang Tidak Konsisten.

Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan fluktuasi, yang mengindikasikan adanya masalah dalam konsistensi layanan.

- b. Tidak tercapainya target Pengesahan Raperda menjadi Perda.

Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu masih di bawah target, menunjukkan adanya kendala dalam proses legislasi.

- c. Agenda DPRD yang dinamis.

Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan tugas Anggota DPRD menjadi terkendala dikarenakan sering terjadi perubahan jadwal pembahasan dari agenda yang telah ditetapkan.

- d. Keterlambatan dalam Pembahasan LKPJ.

Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu menunjukkan adanya masalah dalam koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah.

- e. Nilai AKIP yang tidak mencapai target.

Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan angka yang tidak memuaskan, mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan.

3. Permasalahan dan hambatan tersebut diatas tentunya akan berpengaruh kepada pencapaian tujuan organisasi yang tertuang pada IKU (Indikator Kinerja Utama).

4. Tantangan dan Peluang Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Harapan Masyarakat:

Masyarakat mengharapkan layanan yang lebih baik dan transparan, yang menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD untuk memenuhi ekspektasi tersebut.

- b. Sumber Daya Manusia yang Terbatas:

Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM di Sekretariat DPRD dapat menghambat efektivitas pelayanan.

- c. Kompleksitas Proses Legislasi:
Proses legislasi yang kompleks dan memerlukan banyak tahapan dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan Raperda.
- d. Perubahan Kebijakan yang Cepat:
Perubahan kebijakan yang cepat di tingkat nasional dan regional dapat menyulitkan perangkat daerah dalam menyesuaikan diri.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan.
 - b. Kerjasama dengan Stakeholder:
Membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder dapat meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas.
 - c. Program Pelatihan untuk SDM:
Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM di Sekretariat DPRD.
 - d. Inisiatif Partisipasi Masyarakat:
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.
 - e. Pengembangan Sistem Pelaporan yang Efektif:
Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efektif untuk memantau kinerja dan hasil program.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, isu penting yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Bekasi antara lain:
- a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi.
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi merujuk pada upaya

untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

b. Penguatan Kapasitas SDM.

Memperkuat kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Didalam menjalankan perannya, Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada dengan cara seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, maupun peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan produktivitas kerja dapat meningkat dan meningkatkan kualitas pelayanan, mengatasi tantangan, membangun inovasi, meningkatkan daya saing bagi organisasi.

c. Optimalisasi Proses Legislasi.

Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan Raperda dan anggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislasi berkaitan erat dengan dengan efektivitas DPRD Kota Bekasi dan/atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan belum optimal. Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan SDM berpengaruh kepada optimalnya proses legislasi.

d. Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan

Selain menyusun Peraturan Daerah terdapat dua fungsi lain yang harus dijalankan oleh DPRD Kota Bekasi, yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan. Fungsi penganggaran terkait dengan penyusunan dan pengesahan APBD dan APBDP Kota Bekasi termasuk, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Optimalisasi dukungan terhadap kedua fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Kota Bekasi.

e. Peingkatan Harmonisasi antara Eksekutif dan Legislatif.

Meningkatkan harmonisasi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Hal ini sangat penting yaitu untuk memastikan agar pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Harmonisasi yang baik akan Meningkatkan kolaborasi yang kuat dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil. Tujuan pada Renja ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Perencanaan Pembangunan dan Keuangan yang Sehat, Transparan dan Akuntabel”. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Sekretariat DPRD merumuskan Tujuan sebagai berikut.

Tujuan	: Meningkatkan Fasilitas Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.
Indikator Tujuan	: Prosentase Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan DPRD

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan terdiri dari:

Sasaran 1	: Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Indikator Sasaran 1	: Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu
Indikator Sasaran 2	: Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu
Indikator Sasaran 3	: Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Adapun Sasaran 2 dalam mendukung tercapainya Tujuan adalah:

Sasaran 2	: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
Indikator Sasaran	: Nilai AKIP Perangkat Daerah

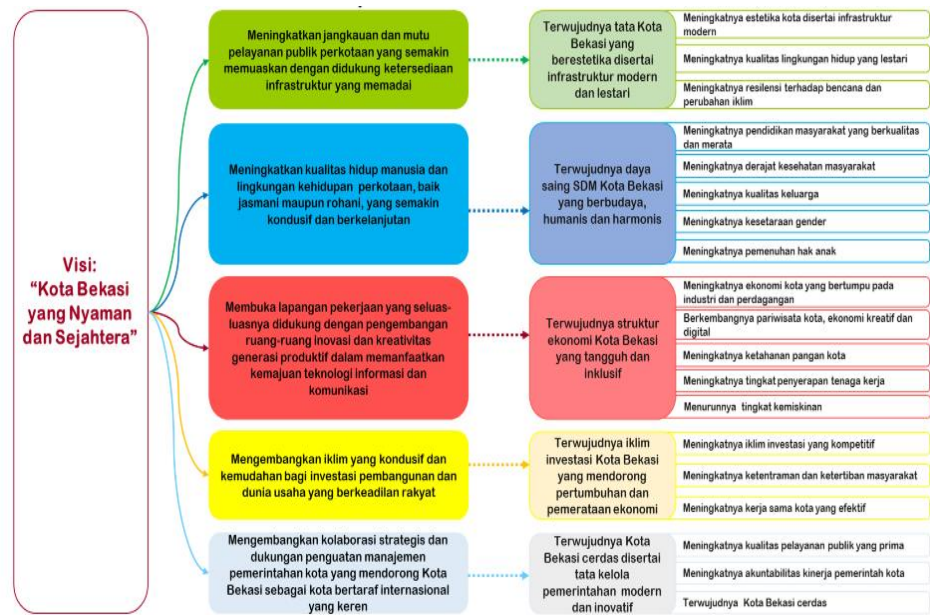
Tabel 3. 1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	IKU	Target Kinerja Sasaran		
							2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan fasilitasi kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Persentase pengesahan anggaran tepat waktu	$\frac{\text{Perda dan Perkada APBD/LP2APBD yang disahkan}}{100\%} \times$ Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Persentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	$\frac{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}}{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja + Nilai komponen pengukuran kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Nilai	77,7	77,8	77,9

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2024-2026

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan Pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.



Sumber: Bappelitbangda Kota Bekasi, 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode lima tahun. RPJMD berfungsi untuk mengarahkan dan menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk Sekretariat DPRD, dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Dari data di atas, keterkaitan antara Sekretariat DPRD Kota Bekasi dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi yang tertuang di dalam RPJMD Kota Bekasi adalah:

- Visi : Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera
- Misi : Misi ke 5 (lima), yaitu Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.
- Tujuan : Tujuan ke 5 (lima), yaitu Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata Kelola pemerintahan modern yang inovatif.
- Sasaran : Sasaran ke-17 (tujuh belas) yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima”

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkomitmen untuk menyusun rencana strategis yang berlandaskan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. IKK ini menjadi acuan penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil selama periode 2025-2029, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Tabel 3. 2
Tujuan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasaan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan (diolah)

Serta menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud. IKK ini menjadi acuan penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan diambil selama periode 2025-2029, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi secara optimal, Sekretariat DPRD menetapkan tujuan untuk mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan efisien. Tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh program dan kegiatan yang dirancang dalam rencana kerja perubahan 2025.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD menggunakan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan sebagai ukuran utama. Indikator ini mencerminkan sejauh mana Sekretariat mampu memberikan layanan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan.

Untuk mencapai tujuan dan indikator tersebut, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD, yaitu:

Tabel 3. 3
Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan (diolah)

Keterkaitan yang erat antara tujuan, indikator, dan sasaran ini menciptakan kerangka kerja yang sinergis bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategisnya. Dengan mengedepankan tingkat kepuasan anggota DPRD sebagai indikator kunci, seluruh sasaran yang telah ditetapkan diarahkan untuk menghasilkan pelayanan yang profesional dan mendukung ketercapaian tujuan utama. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai unit pendukung yang handal dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3. 4
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja 2025
Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
NSPK: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	65,00	65,50	66,00	66,50	67,00	67,50	Nilai
		Terpenuhinya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen (%)

Dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD, kami telah menetapkan beberapa sasaran yang terukur dan relevan. Setiap sasaran ini akan dievaluasi menggunakan indikator yang telah ditentukan, yang akan memberikan gambaran jelas tentang pencapaian kinerja.

Berikut adalah penjelasan mengenai indikator dan rumus pengukurannya:

A. Rumusan Penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi

1. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD

Penjelasan/Rumus	Sumber Data
<p>Nilai tingkat kepuasan diukur melalui kuesioner berupa pertanyaan atas 9 (sembilan dimensi layanan) yaitu: kinerja, kompetensi aparatur, kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan, pelayanan keuangan, perilaku aparatur, integritas aparatur, akuntabilitas serta sarana dan prasarana.</p> <p>Responden seluruh anggota DPRD, dengan pilihan jawaban:</p> <p>Sangat Baik (Skor 4) Baik (Skor 3) Kurang Baik (Skor 2) Tidak Baik (Skor 1)</p> <p>Data jawaban responden diolah dengan table Krecjie & Morgan untuk mendapatkan hasil dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>Sangat Baik Nilai 88,31 – 100 Baik Nilai 76,61 – 88,30 Kurang Baik Nilai 65,00 – 76,60 Tidak Baik Nilai 25,00 – 64,99</p>	Bagian Umum Bagian PK Bagian PP Bagian FPP

Nilai tingkat kepuasan diukur melalui kuesioner berupa pertanyaan atas 9 (sembilan dimensi layanan) yaitu: kinerja, kompetensi aparatur, kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan, pelayanan keuangan, perilaku aparatur, integritas aparatur, akuntabilitas serta sarana dan prasarana.

2. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Penjelasan/Rumus	Sumber Data
<p>Tugas dan fungsi DPRD meliputi: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Tingkat persentase diukur terhadap fasilitasi atas 3 (tiga) tugas dan fungsi DPRD dengan rumus :</p> $\frac{\text{Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N} + \text{Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N} + \text{Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan} + \text{Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD}}{4}$	Bagian Umum Bagian PK Bagian PP Bagian FPP

Tugas dan fungsi DPRD meliputi: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

B. Rumusan Penghitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Kota Bekasi

1. Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N

(Jumlah SK Penugasan dan SK Pembentukan / Jumlah Raperda yang akan dibahas berdasarkan rapat BANMUS) x 100%

2. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Tepat waktu/Tidak tepat waktu

3. Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

(Jumlah pengawasan terhadap perangkat daerah yang terfasilitasi / Jumlah perangkat daerah) x 100%

4. Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD

(Jumlah dokumen perencanaan fasilitasi layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD yang terealisasi / Jumlah dokumen perencanaan fasilitasi layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD) x 100%

3.2 Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan dan Anggaran Pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025

Menindaklanjuti Pada tahun berjalan 2025 terdapat Surat Edaran Wakil Wali Kota Bekasi Nomor: 000.7.2.4/1053/Bappelitbangda.AP4EP tanggal 24 Pebruari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Pebruari 2025 tentang Penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkewajiban menyusun Perubahan Renja.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan. Pada Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan usulan penambahan 3 sub kegiatan baru sehingga total sub kegiatan menjadi 60 (enam puluh) sub kegiatan. Adapun terdapat perubahan dari pagu anggaran dari anggaran sebesar Rp. 237.879.282.132,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah) menjadi Rp. 207.938.555.463 (Dua Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 terdapat perubahan dan penambahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan maupun anggaran sebagaimana berikut:

Tabel 3. 5

Rencana Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3		4	5		6		7
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					100%	104.793.028.704	110.431.300.324	
		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100%	98%	80.000.000	80.000.000	
4.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen dan Laporan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		100%	7 Dokumen	80.000.000	80.000.000	
4.02.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	12 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000	40.000.000	-
4.02.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi	3 Laporan	4 Laporan	40.000.000	40.000.000	-
		Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%	88%	18.793.339.000	15.675.969.554	
4.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK		100%	18 Lap	18.793.339.000	15.675.969.554	
4.02.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	2.086 Orang/ Bulan	2.086 Orang/ Bulan	18.729.339.000	15.611.969.554	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3		4	5		6		7
4.02.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi	2 Laporan	2 Laporan	40.000.000	40.000.000	-
4.02.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bekasi	15 Laporan	15 Laporan	24.000.000	24.000.000	-
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		100%	86.2%	951.170.000	951.170.000	
4.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun sesuai NSPK		100%	2 Laporan	951.170.000	951.170.000	
4.02.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	52 Orang	52 Orang	379.170.000	379.170.000	-
4.02.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bekasi	48 Orang	48 Orang	572.000.000	572.000.000	-
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%	88%	6.679.329.562	7.029.329.562	
4.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai NSPK		100%	36 Laporan	6.679.329.562	7.029.329.562	
4.02.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	1 Paket	1 Paket	150.000.000	150.000.000	-
4.02.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Paket	4 Paket	2.937.763.000	2.937.763.000	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3		4	5		6		7
4.02.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 Paket	3 Paket	459.116.562	459.116.562	-
4.02.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	4 Dokumen	4 Dokumen	580.000.000	580.000.000	-
4.02.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	1.552.450.000	1.902.450.000	-
4.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel		100%	96.54%	2.000.000.000	1.678.596.000	
4.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Disediakan		100%	1 Laporan	2.000.000.000	1.678.596.000	
4.02.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	220 Unit	349 Unit	2.000.000.000	1.678.596.000	-
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%	88%	1.349.283.040	3.955.043.826	
4.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK		100%	60 Laporan	1.349.283.040	3.955.043.826	
4.02.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi	566 Laporan	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	-
4.02.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	36 Laporan	36 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000	-
4.02.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	124.283.040	2.730.043.26	-
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		100%	96.54%	9.062.000.000	8.442.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3		4	5		6		7
4.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara		100%	4 Laporan	9.062.000.000	8.442.000.000	
4.02.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi	1 Unit	0 Unit	120.000.000	-	-
4.02.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	33 Unit	33 Unit	510.000.000	510.000.000	-
4.02.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	100 Unit	100 Unit	100.000.000	100.000.000	-
4.02.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi	177 Unit	177 Unit	832.000.000	832.000.000	-
4.02.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	4 Unit	4 Unit	7.500.000.000	7.000.000.000	-
		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%	88%	64.877.907.102	71.579.191.382	
4.02.01.2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan kesejahteraan DPRD		100%	3 Lap	64.877.907.102	71.579.191.382	
4.02.01.2.1 5.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Bekasi	650 Orang /Bulan	650 Orang /Bulan	63.942.907.102	70.644.191.382	-
4.02.01.2.1 5.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Bekasi	6 Paket	6 Paket	770.000.000	770.000.000	-
4.02.01.2.1 5.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Bekasi	50 Orang	50 Orang	165.000.000	165.000.000	-
		Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100%	88%	1.000.000.000	1.040.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3		4	5		6		7
4.02.01.2.1 6	Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Laporan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD		100%	13 Laporan	1.000.000.000	1.040.000.000	
4.02.01.2.1 6.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Kota Bekasi	-	1 Dokumen	-	40.000.000	-
4.02.01.2.1 6.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					100%	132.384.213.428	97.507.255.139	
		Persentase Terasilinasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA	Persentase Fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N		100%	100%	25.454.205.000	17.780.418.000	
4.02.02.2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersusnya Dokumen Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100%	5 Laporan	25.454.205.000	17.780.418.000	
4.02.02.2.0 1.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Bekasi	2 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000	1.450.000.000	-
4.02.02.2.0 1.02	Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bekasi	10 Dokumen	1 Dokumen	10.504.205.000	6.682.250.000	-
4.02.02.2.0 1.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Kota Bekasi	10 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000.000	4.135.068.000	-
4.02.02.2.0 1.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	Kota Bekasi	7 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000.000	5.122.010.000	-
4.02.02.2.0 1.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000	391.090.000	-
		Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N		100%	Tepat Waktu	7.586.420.000	4.100.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
		Sebelum	Setelah	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
					Sebelum	Setelah	Sebelum		Setelah
1	2	3		4	5		6		7
4.02.02.2.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran		100%	6 Laporan	7.586.420.000	4.100.000.000	
4.02.02.2.0 2.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000	1.000.000.000	-
4.02.02.2.0 2.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000	500.000.000	-
4.02.02.2.0 2.03	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	735.000.000	1.000.000.000	-
4.02.02.2.0 2.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.116.420.000	750.000.000	-
4.02.02.2.0 2.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	735.000.000	350.000.000	-
4.02.02.2.0 2.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000	500.000.000	-
		Persentase Tervaliditasnya Kegiatan DPRD	Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	100%	35.027.514.928	23.638.514.928	
4.02.02.2.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersedianya Laporan dan Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	51 Laporan	35.027.514.928	23.638.514.928	
4.02.02.2.0 3.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	5.311.670.264	4.289.420.264	-
4.02.02.2.0 3.02	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	5.311.670.264	4.289.420.264	-
4.02.02.2.0 3.03	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	5.311.670.264	4.289.420.264	-
4.02.02.2.0 3.04	Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	5.311.670.264	4.289.420.264	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3		4	5		6		7
4.02.02.2.0 3.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000	1.000.000.000	-
4.02.02.2.0 3.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.000.000	4.500.000.000	-
4.02.02.2.0 3.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	1 Dokumen	2.580.833.872	980.833.872	-
		Persentase Tervaliditasnya Kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD		100%	100%	64.316.073.500	51.988.322.211	
4.02.02.2.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	24 Laporan	23.917.612.000	22.075.052.000	
4.02.02.2.0 4.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Kota Bekasi	-	1 Dokumen	0	27.440.000	-
4.02.02.2.0 4.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Bekasi	6 Dokumen	6 Dokumen	6.820.000.000	4.750.000.000	-
4.02.02.2.0 4.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Bekasi	204 Orang	210 Orang	2.341.612.000	2.341.612.000	-
4.02.02.2.0 4.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Bekasi	54 Orang	72 Orang	756.000.000	756.000.000	-
4.02.02.2.0 4.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Bekasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000.000	12.500.000.000	-
4.02.02.2.0 4.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Bekasi	3 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000.000	1.700.000.000	-
4.02.02.2.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	10 Laporan	13.226.007.500	15.865.007.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/Sasaran/ Outcome	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Perubahan Tahun 2025				Ket	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)		
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah
1	2	3		4	5		6		7
4.02.02.2.0 5.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kota Bekasi	3 Laporan	3 Laporan	284.182.500	284.182.500	-
4.02.02.2.0 5.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disusun	Kota Bekasi	3 Dokumen	3 Dokumen	1.225.000.000	925.000.000	-
4.02.02.2.0 5.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Bekasi	3 Dokumen	3 Dokumen	11.716.825.000	12.855.825.000	-
4.02.02.2.0 5.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Kota Bekasi	-	7500 Orang	-	1.800.000.000	-
4.02.02.2.0 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100%	12 Laporan	3.089.068.000	2.089.068.000	
4.02.02.2.0 6.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Bekasi	12 Laporan	12 Laporan	3.089.068.000	2.089.068.000	-
4.02.02.2.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD	Tersedianya Laporan dan Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD		100%	16 Lap	24.083.386.000	11.959.194.711	
4.02.02.2.0 8.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Bekasi	12 Dokumen	0 Dokumen	8.245.820.000	0	-
4.02.02.2.0 8.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Kota Bekasi	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000	659.194.711	-
4.02.02.2.0 8.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	Kota Bekasi	3 Dokumen	3 Dokumen	13.037.566.000	10.000.000.000	-
4.02.02.2.0 8.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Bekasi	12 Dokumen	12 Dokumen	1.300.000.000	1.300.000.000	-
TOTAL							237.177.242.132	207.938.555.463	

Dengan adanya Renstra 2025-2029, maka terdapat pula perubahan terhadap Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025, yaitu berkaitan dengan Indikator Program, Indikator Kegiatan, Penambahan Sub Kegiatan, serta perubahan baik target dan anggaran pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Terdapat 8 (delapan) indikator program yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari 2 (dua) program yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dan dijadikan dasar analisis dan akuntabilitas kinerja, yaitu :

No.	Program	Indikator Program	Target
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	a. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	98%
		b. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	88%
		c. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	86.2
		d. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	96.54%
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	a. Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N	100%
		b. Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	Tepat Waktu
		c. Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%
		d. Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD	100%

- b. Terdapat perubahan terkait indikator, target, dan anggaran kegiatan (dapat dilihat pada Tabel 3.5).
- c. Terdapat perubahan terkait sub kegiatan yaitu target, anggaran, dan penambahan sub kegiatan baru. Sub kegiatan baru yang muncul pada rencana kerja perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah :
- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD, yaitu digunakan untuk pembayaran iuran anggota Adeksi (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia).
 - 2) Sub Kegiatan Orientasi DPRD, yaitu digunakan untuk mengakomodir anggota DPRD yang belum mengikuti kegiatan Orientasi DPRD.

- 3) Sub Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah, yaitu digunakan untuk kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah.

Adapun perubahan baik target dan anggaran pada beberapa sub kegiatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap rencana kerja tahun 2025.

Pada rencana kerja perubahan Tahun 2025, pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkurang menjadi Rp. 207.938.555.463,- (Dua Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribuan Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dari Rp. 237.879.282.132,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribuan Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai Triwulan II Tahun 2025 yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan yang telah teridentifikasi sehingga diharapkan akan mampu menjawab permasalahan dan memperbaiki kualitas *output* perencanaan dan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dilakukan oleh berbagai komponen pemerintah daerah.

Adapun kaidah pelaksanaan perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bagian, sub bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, agar melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);

5. Agar Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Sekretariat DPRD Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025, sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bagian;
 - b. Sekretaris DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala Bagian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA bagian periode sebelumnya;
 - d. Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyusun evaluasi RENJA berdasarkan hasil evaluasi bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;

Rencana tindak lanjut Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2025 akan melaksanakan:

1. Analisis pengelolaan program dan anggaran dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
2. Analisis dan evaluasi SDM dalam rangka penguatan kapasitas SDM.

3. Koordinasi dan harmonisasi antara legislatif dan eksekutif, serta *stakeholder* dalam pengoptimalisasian fungsi DPRD.
4. Pengembangan Kebijakan Berbasis Data dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.
5. Monitoring dan evaluasi secara berjenjang, serta pengembangan sistem pelaporan yang efektif terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
6. Peningkatan Nilai AKIP dengan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2025. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Renja ini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 September 2025
Sekretaris DPRD Kota Bekasi



Lia Erliani, A.P, M.Si
NIP. 19750606 199311 2 001

Lampiran

Rumusan Penghitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus	Sumber Data
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Nilai	<p>Nilai tingkat kepuasan diukur melalui kuesioner berupa pertanyaan atas 9 (sembilan dimensi layanan) yaitu: kinerja, kompetensi aparatur, kecepatan pelayanan, kualitas pelayanan, pelayanan keuangan, perilaku aparatur, integritas aparatur, akuntabilitas serta sarana dan prasarana.</p> <p>Responden seluruh anggota DPRD, dengan pilihan jawaban:</p> <p>Sangat Baik (Skor 4) Baik (Skor 3) Kurang Baik (Skor 2) Tidak Baik (Skor 1)</p> <p>Data jawaban responden diolah dengan table Krecjie & Morgan untuk mendapatkan hasil dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>Sangat Baik Nilai 88,31 – 100 Baik Nilai 76,61 – 88,30 Kurang Baik Nilai 65,00 – 76,60 Tidak Baik Nilai 25,00 – 64,99</p>	<p>Bagian Umum</p> <p>Bagian PK</p> <p>Bagian PP</p> <p>Bagian FPP</p>

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Rumus	Sumber Data
<p>Terpenuhinya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</p>	<p>Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</p>	<p>Persentase</p>	<p>Tugas dan fungsi DPRD meliputi: Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.</p> <p>Tingkat persentase diukur terhadap fasilitasi atas 3 (tiga) tugas dan fungsi DPRD dengan rumus :</p> $\frac{\text{Persentase fasilitasi pembahasan Raperda menjadi Perda tahun N} + \text{Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N} + \text{Persentase fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan} + \text{Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD}}{4}$	<p>Bagian Umum Bagian PK Bagian PP Bagian FPP</p>

Rumusan Penghitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Penjelasan/Rumus	Sumber Data
Sekretariat DPRD sebagaimana diatur pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N	%	(Jumlah SK Penugasan dan SK Pembentukan / Jumlah Raperda yang akan dibahas berdasarkan rapat BANMUS) x 100%	Bagian PP
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat waktu/ Tidak tepat waktu	Tepat waktu/Tidak tepat waktu	Bagian FPP
	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	(Jumlah pengawasan terhadap perangkat daerah yang terfasilitasi / Jumlah perangkat daerah) x 100%	Bagian FPP
	Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD	%	(Jumlah dokumen perencanaan fasilitasi layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD yang terrealisasi / Jumlah dokumen perencanaan fasilitasi layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD) x 100%	Semua Bagian

Rumusan Penghitungan Indikator Program
Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Program	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Penjelasan/Rumus	Sumber Data
Program Penunjang urusan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	Persentase keselarasan program (jumlah program dalam APBD / jumlah program dalam Renja PD x 100%) + Persentase keselarasan kegiatan (Jumlah kegiatan dalam APBD / Jumlah kegiatan dalam Renja PD x 100%) + Persentase kelesarasan sub kegiatan (Jumlah sub kegiatan dalam APBD / Jumlah sub kegiatan dalam Renja PD x 100%) / 3	Bagian PK
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	Jumlah Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan / Jumlah Anggaran Program Penunjang Urusan x 100 %	Bagian PK
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	Perhitungan IP ASN berasal dari empat dimensi : Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Nilai IP ASN Perangkat Daerah Tahunan dikeluarkan oleh BKPSDM	BKPSDM
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	Persentase Waktu Penyelesaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/RK BMD + Persentase Ketepatan Penyerahan Laporan BMD Semester I (paling lambat akhir Juli) + Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Terhadap Temuan BPK / 3	Bagian Umum

Program	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Penjelasan/Rumus	Sumber Data
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda menjadi Perda Tahun N	%	Jumlah Pembahasan Raperda Menjadi Perda Yang Terfasilitasi / Jumlah Permohonan Pembahasan Raperda Menjadi Perda x 100%	Bagian PP
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat waktu/ Tidak tepat waktu	Tepat waktu/Tidak tepat waktu	Bagian FPP
	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	(Jumlah pengawasan terhadap perangkat daerah yang terfasilitasi / Jumlah perangkat daerah) x 100%	Bagian FPP
	Persentase Fasilitasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Kegiatan DPRD	%	(Jumlah layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD yang terealisasi / Jumlah layanan layanan peningkatan kapasitas dan kegiatan DPRD) x 100%	Semua Bagian